



# Ada Perlambatan Dibanding Tahun Lalu

## ■ Jumlah Permohonan Nomor Induk Berusaha Menurun

**YOGYA, TRIBUN** - Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY mencatat adanya penurunan permintaan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tahun ini.

Kepala Seksi Kemudahan Berusaha, DPPM DIY, Sigit Suryo mengatakan, permintaan NIB secara online pada periode Januari-Juni 2020 mengalami perlambatan. Tercatat hanya sekitar 1.293 permohonan NIB yang masuk di periode tersebut. Padahal, jangka waktu yang di tahun lalu, tercatat ada 3.879 permohonan NIB usaha baru.

"Investasi usaha pada tahun ini memang terjadi sedikit perlambatan bila dibandingkan dengan tahun lalu," jelas Sigit kepada *Tribun Jogja*, Selasa (30/6).

Berdasarkan data DPPM DIY melalui *Online Single Submission* (OSS), terjadinya penurunan NIB pun berpengaruh pada penerbitan izin lainnya. Seperti, penerbitan izin berdasarkan proyek di mana pada Januari-Juni 2020 pertumbuhannya hanya 6.682 proyek. Padahal, pada Januari-Juni 2019 mencapai nilai 24.210 proyek.

"Terjadinya penurunan NIB akan berimbas pada penerbitan izin lainnya, karena ini sejalan dan berkaitan. Bila satu mengalami penurunan, semuanya pun akan turun juga," ujar Sigit.

Selain itu, sedikitnya pemohon NIB membuat izin berusaha otomatis mengalami kekdiliran. Pada Januari-Juni 2020, permintaan izin usaha hanya sebesar 407 usaha. Sedangkan, pada Ja-

nuari-Juni 2019, permintaan izin usaha tercatat hingga 6.724 usaha.

Menurut Sigit, kecenderungan lambatnya pertumbuhan NIB bisa disebabkan banyak faktor. Misalnya, adanya pandemi Corona atau memang tidak adanya pembukaan usaha baru. Namun, pihaknya belum bisa memastikan hal tersebut.

"Karena selama pandemi ini, ruang gerak untuk terjun ke lapangan juga terbatas. Selama ini, hanya mengandalkan portal online saja untuk memantau," terang Sigit.

DPPM DIY sebetulnya juga mencatat adanya pertumbuhan positif atas realisasi penanaman modal alias investasi selama triwulan pertama 2020 ini. Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal, DPPM DIY, Siti Inganati mengatakan, triwulan pertama cenderung berjalan cukup stabil. Target APBD DIY sepanjang tahun 2020 sekitar Rp988,91 miliar namun realisasi investasi di triwulan pertama sudah mencapai Rp806,46 miliar. "Artinya, sudah mencapai target sebesar 81,55 persen," jelas Siti, Kamis (25/6).

Dari lima kabupaten/kota di wilayah DIY, realisasi investasi terbesar ada di Kulon Progo. Berupa penambahan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sekitar Rp764,24 miliar dan penambahan penanaman modal asing (PMA) senilai Rp4,18 miliar.

Siti menambahkan, bila dibandingkan dengan realisasi investasi penambahan PMDN pada 2019, realisasi di 2020 me-

ningkat 17,8 persen ke level Rp796,83 miliar. Sebaliknya, penambahan PMA mengalami perlambatan 64,3 persen ke level Rp9,63 miliar padahal 2019 kemarin senilai Rp27,01 miliar.

### Produk UMKM

Di sisi lain, Pemerintahan Kota (Pemkot) Yogyakarta mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memiliki izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sebagai legalitas produk. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil (UMK), Dinkop UMK Nakertrans Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, ada 26.000 UMKM di Kota Yogya namun yang memiliki IUMK hanya sekitar 5.000 usaha saja.

Masih banyak UMKM yang produknya belum tetap dan jenis produknya berubah-ubah. Padahal, untuk mengajukan IUMK, pelaku UMKM harus memiliki produk yang konsisten. "Keadaan inilah yang menjadi perhatian kami. Pendampingan terus dilakukan agar pelaku UMKM dapat konsisten dalam berproduksi," ujar Rihari, Senin (29/6).

Rihari menambahkan, pentingnya IUMK bagi pelaku UMKM untuk melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI), memberikan kemudahan dalam pemasaran ke luar negeri, serta peminjaman untuk usaha dan modal di lembaga keuangan bank atau non-bank. Selain itu, dengan IUMK pelaku UMKM pun akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha. (ndg)

| Instansi                                            | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|-----------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan              | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi |              |       |                 |

Yogyakarta, 07 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005